



RENCANA KERJA

TAHUN
2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Dokumen Renja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 guna mendukung perencanaan tahunan daerah di lingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kab. Jombang Tahun 2024.

Proses perencanaan pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan pemerintah Kabupaten Jombang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memuat tujuan, sasaran, perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menjadi landasan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan disektor Pemberdayaan Masyarakat.

Hal - hal yang berkenan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024, sedangkan kegiatan kegiatan rutin yang melekat dalam tugas pokok fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami laksanakan guna menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk pelayanan publik. Harapan kami kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, dalam melaksnakan tugas-tuganya berpedoman pada Rencana Kerja yang telah dibuat sehingga dapat berjalan lancar, terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024 yang kami susun, semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jombang, 14 Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. JOMBANG**

SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 200003 1 001



BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang secara substansial menerjemakan visi, misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program, Kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. 1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 227, telah mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima 5 (lima) tahun. Arah Kebijakan Pembangunan 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Jombang “Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya berbasis Agribisnis”. Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah terdiri dari analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dengan sistematika minimal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
- e. Penutup.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaannya mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi sub kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk

menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Maka Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematis rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Verifikasi juga bertujuan untuk menemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Renstra DPMD Kab. Jombang Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja DPMD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
27. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 050/10347/415.01/2022 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemberdayaan, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2024.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja pada masing-masing Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Arah Kebijakan Pembangunan 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Jombang “Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya berbasis Agribisnis”. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan arah kebijakan Pembangunan 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah:

“Meningkatnya status desa”

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 5 program dan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada tahun 2023. Adapun capaian penyerapan anggaran kegiatan tahun 2023 adalah 35%. Sedangkan realisasi kinerja untuk semua program/kegiatan dan sub kegiatan tercapai 50%. Beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2023 sampai dengan tri bulan 2 dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; nihil
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan; nihil
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; nihil
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; kinerja semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 - Meningkatkan kualitas perencanaan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
 - Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2024.
 - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya dan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan.
 - Melakukan koordinasi secara intensif dengan provinsi dan OPD terkait update kebijakan secara terus-menerus.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	10 dokumen	10 dokumen	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	4 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	4 Laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	17 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	17 dokumen	17 dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup DPMD yang difasilitasi	14 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	14 bulan	14 Bulan	100
	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 kali	n/a	n/a	n/a	n/a	4 kali	4 kali	100
	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi	1 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi	8 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	8 jenis	8 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang Cetakan yang terfasilitasi	2 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan yang terfasilitasi	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Kali	20 Kali	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum kantor yang terfasilitasi	8 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	8 jenis	8 jenis	100
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	10 unit	10 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	20 unit	20 unit	100
	PROGRAM PENATAAN DESA	% Desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	30 %	n/a	n/a	n/a	n/a	30 %	30 %	100
		% Desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	40 %	n/a	n/a	n/a	n/a	40 %	40 %	100
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang mengajukan Raperdes kewenangan desa	30 %	n/a	n/a	n/a	n/a	30 %	30 %	100
		Persentase desa yang dievaluasi perkembangan statusnya	40 %	n/a	n/a	n/a	n/a	40 %	40 %	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang dievaluasi perkembangan statusnya	8 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	8 desa	8 desa	100
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Presentase desa yang dibina tentang kewenangan desa	40 %	n/a	n/a	n/a	n/a	40 %	40 %	100
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana & prasarana desa	40 %	n/a	n/a	n/a	n/a	40 %	40 %	100
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase kawasan perdesaan yang aktif	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama antar desa yang dibina	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase kawasan perdesaan yang dibina	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa	100 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	100 desa	100 %	100
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	15 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	15 desa	15 desa	100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Perdesaan yang dibina	2 kawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	2 kawasan	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	75 %	n/a	n/a	n/a	n/a	75 %	75 %	100
		Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang melaporkan LPPDes	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		persentase penetapan pengisian jabatan aparatur pemerintah desa	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Prosentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Prosentase desa yang telah menyusun produk hukum	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan penyusunan produk hukum desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	302 desa	302 desa	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang dibina	25 %	n/a	n/a	n/a	n/a	25 %	25 %	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	persentase desa yang menyelenggarakan Musyawarah Desa	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Prosentase desa yang menyelenggarakan PILKADES	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	persentase pengisian jabatan perangkat daerah	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang update data Profil Desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	302 desa	302 desa	100
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan manajemen pemerintahan desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	302 desa	302 desa	100
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menyusun Laporan Inventarisasi Aset	75 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	75 desa	75 desa	100
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase yang BPDnya dibina	75 %	n/a	n/a	n/a	n/a	75 %	75 %	100
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	13 desa	13 desa	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	persentase desa yang menyusun LPPDes	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan	302 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	302 desa	302 desa	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) yang status/kategorinya meningkat	36 %	n/a	n/a	n/a	n/a	36 %	36 %	100
		Persentase desa pos pelayanan Teknologi (posyantek) tingkat Kecamatan yang dibina	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar : 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja DPMD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategoriannya maju	30 %	n/a	n/a	n/a	n/a	30 %	30 %	100
		Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	43 %	n/a	n/a	n/a	n/a	43 %	43 %	100
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang dibina	35 BUMDes	n/a	n/a	n/a	35 BUMDes	35 BUMDes	100
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang terbentuk	6 posyantek	n/a	n/a	n/a	6 posyantek	6 posyantek	100
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah keikutsertaan desa yang melaksanakan BBGRM	100 %	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100

*menggunakan format tabel T-C.29.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan serangkaian proses yang terdiri dari proses pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang menimbulkan dampak baik secara internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, proses identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan

Sistem kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

2. Aspek Pelaksanaan

Sistem pelaksanaan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jombang termuat dalam tugas tugas pokok dan fungsi Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- l. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - Pengelolaan aset;
 - Pengelolaan kearsipan;
 - Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkup Dinas;
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
 - c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
 - d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
 - h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;

- i. Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi pengolahan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengolah barang-barang inventaris kantor;
 - d. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran dinas;
 - e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

II. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Tugas pokok Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun kebijakan dan program di Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan sosial budaya serta dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong, masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

III. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan, dan kerja sama desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan desa, sesuai pedoman, prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah desa;

- c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam kabupaten dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan lembaga ekonomi desa;
- e. Pembinaan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

IV. Bidang Pembangunan Desa

Bidang pembangunan desa melakukan tugas, membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan program dibidang pembangunan desa dan penataan desa;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi penataan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
- d. Pemantauan dan evaluasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan (RPJM dan RKP desa);
- f. Pembinaan pelaksanaan musyawarah desa;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana desa;
- h. Pembinaan perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa;
- i. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

V. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan tugas, membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan program dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan batas desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa, profil desa, dan lomba desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa, produk hukum desa;
- d. Penyelenggaraan pemuihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. Pembinaan pelaksanaan pengangkatan pemberhentian perangkat desa;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- g. Pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi mewajibkan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional untuk menerapkan prinsip koordinasi. Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

3. Aspek Hasil

Unsur utama agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara terarah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan penyusunan perencanaan, antara lain:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- c. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- d. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
- g. Melaksanakan rangkian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, mulai dari penyediaan media penampungan laporan dan aspirasi dari masyarakat umum hingga menuangkan dalam perencanaan program dan kegiatan rencana kerja;
- h. Evaluasi dan revaluasi pelaksanaan perencanaan baik secara internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Pengukuran kinerja program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang rutin dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan menggunakan metode pencermatan yang mendalam. Adapun capaian kinerja disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IRB DPMD			52,99	55,00	82,20	75,00	61,81		82,20	75,00	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023 Nomor 060/116999/415.10/2023 dan Berita Acara Monev Perubahan Renstra dan Renja Nomor 065/03/BA/415.33/2024.
	Nilai SAKIP			71,60	77	n/a	n/a	75,28		n/a	n/a	Pada tahun 2024 indikator nilai SAKIP telah menjadi komponen dalam indikator IRB DPMD
	Jumlah Desa Mandiri			23	50	91	58	47		91	58	Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan pada Pasal 2 bahwa IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri, sehingga perkembangan status desa harus dievaluasi untuk meningkatkan status desa. <u>Dasar perhitungan:</u> - Desa yang ditetapkan perkembangan statusnya dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang telah berhasil melakukan updating data IDM dibagi jumlah desa secara keseluruhan dikalikan 100% Keterangan: - Desa yang ditetapkan perkembangan statusnya = DsTtp - Desa yang telah berhasil updating data IDM = DsUpdate - Jumlah desa se Kab Jombang = DsTot Sehingga perhitungannya sbb: • $DsTtp = \frac{DsUpdate}{DsTot}$

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												$Indeks_{Lingkungan} = \frac{4+5+3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$ Penghitungan Indeks Desa Membangun Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: IDM = $\frac{IKS+IKE+IKL}{3}$ IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan Scoring masing-masing item instrument dapat dilihat pada lampiran I . PENENTUAN STATUS IDM Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan <i>ambang batas</i> sebagai berikut: 1. Desa Sangat Tertinggal 2. Desa Tertinggal 3. Desa Berkembang 4. Desa Maju 5. Desa Mandiri : IDM ≤ 0,4907 : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989 : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155 : IDM > 0,8155
	Persentase desa yang meningkat statusnya			n/a	n/a	47%	57%	n/a		47%	57%	Penetapan target ini didasarkan pada perbandingan antara hasil pengukuran IDM th 2022 yg ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, PDTT no 80 tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa termasuk status desa-desa di Kabupaten Jombang, dengan hasil pengukuran IDM tahun 2023. Dasar Perhitungan: Jumlah Desa dengan nilai IDM meningkat X 100% Jumlah Desa keseluruhan Keterangan: - Jumlah Desa dengan nilai IDM meningkat = DsUp - Jumlah desa keseluruhan = DsTotal

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Sehingga perhitungannya sbb: • $\frac{DsUp}{DsTotal} \times 100\%$
	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar perhitungan: $\frac{\sum \text{capaian kinerja aparatur}}{\sum \text{indikator capaian kinerja aparatur}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan: $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasikinerjaPD yang direalisasikan}}{\sum \text{dokumen perencanaan dan eavaluasi kinerjaPD yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{8 \text{ dok}}{8 \text{ dok}} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 dok	3 dok	3 dok	3 dok	10 dok		3 dok	3 dok	Dasar Perhitungan: Dokumen Perencanaan yang harus tersusun pada tahun 2024 adalah Dokumen Renstra 2024-2026, Perubahan Renja 2024 dan Renja 2024 (3 dokumen).
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			n/a	5 laporan	12 laporan	12 laporan	n/a		12 laporan	12 laporan	Dasar Perhitungan: Dokumen Capaian Kinerja yang harus tersusun pada tahun 2024 adalah Dokumen PK, PK Perubahan, Dokumen Pengukuran Kinerja Tribulan, Dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan, Monev Tribulan, LKjIP. (12 dokumen).
	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan:

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												$\frac{\sum \text{pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dispersip yang difasilitasi}}{\sum \text{pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dispersip yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{14 \text{ bln}}{14 \text{ bln}} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			n/a	33 orang/bln	33 orang	33 orang	n/a		33 orang	33 orang	Dasar Perhitungan: Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD
	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			n/a	n/a	4 dok	4 dok	n/a		4 dok	4 dok	Dasar Perhitungan: Setiap bulan harus memverifikasi laporan keuangan Bulanan Dokumen Laporan Keuangan yang diverifikasi adalah laporan Keuangan Januari sd Desember 2023 (4 Laporan atau pertribulan)
	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan: $\frac{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang direalisasikan}}{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian			n/a	6 dokumen	6 dok	6 dok	n/a		6 dok	6 dok	Dasar Perhitungan: Dok. Adm. Kepeg. disusun 6 dok: 1. SKP Tahun 2024 dan diinput serta diunggah siapASN 2. Inventarisasi kebutuhan diklat pegawai 3. Input kepemilikan sertifikat diklat pegawai pada siapASN 4. Pengajuan kenaikan pangkat periode Oktober 20223dan April 2024 5. Pengajuan Ijin Belajar Pegawai 6. Pengajuan Cuti Pegawai
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			n/a	n/a	30 paket	30 paket	n/a		30 paket	30 paket	Dasar Perhitungan: Sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN DPMD

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan: $\frac{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi umum PD yang direalisasikan setiap bulan}}{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi umum PD yang direncanakan dalam satu tahun}} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan			n/a	15 paket	13 paket	13 paket	n/a		13 paket	13 paket	Dasar Perhitungan: 13 paket komponen instalasi listrik
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan			n/a	19 paket	21paket	21paket	n/a		21paket	21paket	Dasar Perhitungan: 21 jenis peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelayanan administrasi kantor
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			n/a	20 paket	16paket	16paket	n/a		16paket	16paket	Dasar Perhitungan: 16 paket peralatan rumah tangga untuk penunjang pelayanan administrasi kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			n/a	15.230 paket	15.230 paket	15.230 paket	n/a		15.230 paket	15.230 paket	Dasar Perhitungan: 15.230,82 paket bahan logistik kantor: • mamin harian pegawai 40org x 21hr x 11bl = 9.240 paket • BBM operasional kantor 3 kend x 10,4006lt x 16keg x 12bln= 5.990,8 paket
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			n/a	4 paket	5 paket	5 paket	n/a		5 paket	5 paket	Dasar Perhitungan: 5 paket barang cetakan dan penggandaan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-			n/a	2 dok	2 dok	2 dok	n/a		2 dok	2 dok	Dasar Perhitungan: 2 jenis dokumen bahan bacaan kantor: - Jawa Pos

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Undangan yang Disediakan											- Pojok Kiri
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			n/a	30 laporan	42 laporan	42 laporan	n/a		42 laporan	42 laporan	Dasar Perhitungan: 42 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD: - 26 sppd Kadis (6 Jkt+20Sby) - 16 sppd peg. Selain kadis
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	n/a		4 laporan	4 laporan	Dasar Perhitungan: Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan tamu dibuat pertribulan tahun berjalan
	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan: $\frac{\sum \text{paket sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang direalisasikan}}{\sum \text{paket sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			n/a	36 laporan	36 laporan	36 laporan	n/a		36 laporan	36 laporan	Dasar Perhitungan: 36 laporan yaitu: - listrik, - telpon, - internet (3item x 12bl)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			n/a	85 laporan	52 laporan	52 laporan	n/a		52 laporan	52 laporan	Dasar Perhitungan: 52 laporan yakni: - 2 bln laporan jasa tenaga kebesihan - 50 jasa media cetak & online (5 kegiatan x 10media)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			n/a	24 laporan	24 laporan	24 laporan	n/a		24 laporan	24 laporan	Dasar Perhitungan: - 12 laporan honorarium non ASN - 12 lap bpjs kesehatan & bpjs tenaga kerja

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Dasar Perhitungan: $\frac{\sum \text{barang milik daerah dalam kondisi baik}}{\sum \text{barang milik Dispersip yang dipelihara}} \times 100\% = \frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			n/a	1 unit	1 unit	1 unit	n/a		1 unit	1 unit	Dasar Perhitungan: Sesuai dengan jumlah kendaraan dinas jabatan yaitu 1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			n/a	14 unit	20 unit	20 unit	n/a		20 unit	20 unit	Dasar Perhitungan: Sesuai dengan jumlah kendaraan dinas operasional
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			n/a	60 unit	80 unit	80 unit	n/a		80 unit	80 unit	Dasar Perhitungan: Sesuai dengan jumlah sarana & prasarana Gedung kantor
	IKM Desa			83.65	83.95	84.1	84.25	83.95		84.1	84.3	Berdasarkan dokumen survey Indeks kepuasan masyarakat. Dasar Perhitungan: $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi per unsur layanan}}{\text{Jumlah responden per unsur}} \times \text{NRT}$ NRT = Nilai rata-rata tertimbang $= \frac{755,58}{2.737} \times 304,09$ $= 84,1$

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IPP Desa			2.86	2.94	2.94	2.96	2.94		2.94	2.96	Berdasarkan dokumen survey Indeks Pelayanan Publik. Dasar Perhitungan: Nilai IPP=$\sum(\text{Nilai Aspek } n \times \text{Bobot Aspek } n)$ $= 1,01 + 0,59 + 0,3 + 0,45 + 0,52 + 0,07$ $= 2,94$
	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes			n/a	n/a	100%	100%	n/a		100%	100%	-
	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma			n/a	n/a	20.50%	23.80%	n/a		20.50%	23.80%	-
	Persentase LPPDesa berkategori baik			n/a	n/a	9,90%	19,86%	n/a		9,90%	19,86%	-
	Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDes, APBDes yang tersusun			n/a	n/a	100	100	n/a		100	100	-
	Jumlah desa dengan BUMDes aktif			n/a	n/a	62 desa	72 desa	n/a		62 desa	72 desa	-
	Jumlah dokumen hasil fasilitasi			n/a	n/a	21 dok	21 dok	n/a		21 dok	21 dok	Berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Jombang yang menyusun produk hukum desa. Produk hokum meliputi:

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	penyusunan produk hukum desa											Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Dasar Perhitungan: Sesuai dengan Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa. 302 Laporan merupakan jumlah dari 302 Desa yang harus menyusun produk hukum desa.
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			n/a	n/a	42 dok	42 dok	n/a		42 dok	42 dok	Berdasarkan Perbup 42 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes meliputi: 1. Laporan realisasi APBDes 2. CALK Dasar Perhitungan: 42 Dokumen terdiri dari 2 laporan per 21 kecamatan yaitu laporan realisasi APBDes dan CALK yang disusun oleh setiap Desa di Kabupaten Jombang.
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			n/a	302 orang	302 orang	302 orang	n/a		302 orang	302 orang	Berdasarkan kenaikan capaian realisasi tahun n-1, oleh karena itu jumlah target tahun n ditingkatkan. Dasar Perhitungan: Sesuai Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peningkatan target 302 Orang dari target n-1
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan			n/a	2 laporan	0	286 laporan	n/a		0	286 laporan	Berdasarkan pengajuan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Dasar Perhitungan: Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2 Laporan meliputi;

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberhentian Kepala Desa											1. Sk pemberhentian Kepala Desa 2. Sk Pengangkatan Kepala Desa
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			n/a	42 laporan	50 laporan	50 laporan	n/a		50 laporan	50 laporan	Berdasarkan usulan dari desa melalui kecamatan untuk fasilitasi pengisian dan pemberhentian perangkat desa. Dasar Perhitungan: Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3 Laporan meliputi; 1. Surat pengajuan fasilitas CAT 2. Surat Pemberitahuan/tembusan terkait pemberhentian perangkat 3. Surat Pemberitahuan/tembusan terkait pengangkatan perangkat
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa			n/a	2 dok	3 dok	3 dok	n/a		3 dok	3 dok	Berdasarkan dokumen survey kepuasan masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik. Dasar Perhitungan: Sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. 2 Dokumen ini meliputi dokumen SKM dan IPP
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			n/a	2 dok	302 dok	302 dok	n/a		302 dok	302 dok	Berdasarkan Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelola aset desa pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Dan SE Bina Pemdes Kemendagri berbunyi memerintahkan DPMD dan para camat untuk membantu dan memfasilitasi pemerintah desa dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Dasar Perhitungan: 302 Dokumen yaitu Dokumen pengelolaan aset 302 desa di Kabupaten Jombang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			n/a	302 orang	302 orang	302 orang	n/a		302 orang	302 orang	Dasar Perhitungan: Terdapat 302 ketua BPD di setiap desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			n/a	302 desa	100 desa	37 desa	n/a		100 desa	37 desa	Berdasarkan jumlah penetapan batas desa dan jumlah penegasan batas desa. Dasar Perhitungan: Sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa. 604 Desa adalah terdiri dari 302 Desa yang telah ditetapkan penetapan batas desanya dan 302 Desa yang telah ditetapkan penegasan batas desanya.
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa			n/a	302 laporan	302 laporan	302 laporan	n/a		302 laporan	302 laporan	Berdasarkan 2 Dokumen terdiri dari laporan hasil pembinaan laporan kepala desa dan rekapitulasi laporan kepala desa Dasar Perhitungan: Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			n/a	302 dok	2 dok	2 dok	n/a		2 dok	2 dok	Berdasarkan evaluasi diri untuk Pemerintah Desa di Aplikasi EPDESSEL (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) untuk menentukan desa itu dengan kategori (Cepat Berkembang/Bekermbang/Kurang Berkembang) Dasar Perhitungan: Sesuai Permendagri No.81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dank kelurahan. 302 Dokumen merupakan dokumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dari setiap desa yang telah mengevaluasi diri/menginput data di Aplikasi EPDESSEL.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			n/a	1 dok	1 dok	1 dok	n/a		1 dok	1 dok	Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 & Berita Acara Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 23 Februari 2022. Dasar Perhitungan: Pada pemerintahan desa terdapat 1 dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa. Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			n/a	n/a	100 dok	7 dok	n/a		100 dok	7 dok	-
	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif			n/a	n/a	91.50%	93.80%	n/a		91.50%	93.80%	-
	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya			n/a	n/a	194 desa	199 desa	n/a		194 desa	199 desa	-
	jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya			n/a	n/a	8 desa	9 desa	n/a		8 desa	9 desa	-
	jumlah desa yang kawasan			n/a	n/a	2 desa	2 desa	n/a		2 desa	2 desa	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	perdesaannya dibina											
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			n/a	100 dok	5 dok	5 dok	n/a		5 dok	5 dok	Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 23 Februari 2022. Dasar Perhitungan: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota hasil transformasi UPK Eks PNPM menjadi BUMDesa Bersama LKD Berdasarkan permendesa PDTT tahun Nomor 15 Tahun 2021.
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota			n/a	1 dok	4 dok	4 dok	n/a		4 dok	4 dok	Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 23 Februari 2022. Dasar Perhitungan: Jumlah dokumen Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota berdasarkan perbup No 41 Tahun 2021 tentang tata cara kerjasama desa.
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan			n/a	2 dok	2 dok	2 dok	n/a		2 dok	2 dok	Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 23 Februari 2022. Dasar Perhitungan: Di Kabupaten Jombang ada 2 Kawasan yaitu Kawasan agropolitan di Kec.Wonosalam Berdasarkan Perbup Nomor 188.4.45/41/415.3.4/2017 dan Kec. Sumobito Kawasan pertanian. Berdasarkan Perbup Nomor 188.4.45/208/415.3.4/2018.
	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa			n/a	n/a	76.43%	76.43%	n/a		76.43%	76.43%	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa			n/a	n/a	302 desa	302 desa	n/a		302 desa	302 desa	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			n/a	302 unit	1175 unit	1175 unit	n/a		1175 unit	1175 unit	Dasar Perhitungan: Penggunaan DD lebih di fokuskan ke kegiatan selain sarpras berdasarkan perbup 90/2022. Berdasarkan perbup 90/2022 tentang juknis penggunaan DD di kabupaten jombang thn 2023 bahwa penggunaan DD di fokuskan pada kegiatan : BLT (maks 25%), perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, dana oprasional desa (3%), program kegiatan pangan dan hewani (min 20%), pendirian pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMNDes/bumdes pengembangan usaha ekonomi produktif, penanganan stunting, pengembangan desa wisata, penanganan dan pengolahan persampahan desa, peningkatan kapasitas masyarakat sehingga sisa.. sarpras juga dari dana BKK sarpras kabupaten APBD/P-APBD, dari target thn 2022 : 302 unit, sehingga target 2023 di buat tetap 302 untit.Terdapat satu unit sarana dan prasarana Desa di 302 Desa.
	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif			n/a	n/a	100%	100%	n/a		100%	100%	-
	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif			n/a	n/a	302 desa	302 desa	n/a		302 desa	302 desa	-
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang			n/a	5 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	n/a		7 lembaga	7 lembaga	Dasar Perhitungan: Permendagri 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD, terdiri dari 7 Lembaga, yaitu : RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan LAD.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya											
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			n/a	13 laporan	1 laporan	1 laporan	n/a		1 laporan	1 laporan	Permendes 23 Tahun 2017 mengamanatkan pembentukan Posyantek antar Desa yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan. Dasar Perhitungan: Jumlah kecamatan se-Kabupaten Jombang 21 Kecamatan dijadikan dalam bentuk 1 laporan yang memuat 21 kecamatan.
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	n/a		1 laporan	1 laporan	Permendagri 42 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan BBGRM dan Dasar Perhitungan: Rangkaian BBGRM adalah mulai pencaanangan, hari puncak dan lomba BBGRM tingkat Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur dan rangkaian kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan.
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			n/a	1 dok	1 dok	1 dok	n/a		1 dok	1 dok	Dasar Perhitungan: TMMD dilaksanakan 1 lokasi, dengan beberapa kegiatan, mulai pekerjaan fisik dan non fisik (sosialisasi/penyuluhan), rangkaian kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk Dokumen.

*menggunakan format tabel T-C.30.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama belum optimal.
2. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan.
3. Tata kelola pemerintahan desa kurang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang belum maksimal.
4. Keterlambatan proses penyusunan produk hukum desa.
5. Keterlambatan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
6. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih secara manual dan kurang efisien.
7. Belum optimalnya pengelolaan aset desa.
8. Kurangnya inovasi desa.
9. Kurangnya pengembangan potensi desa.
10. Sarpras desa belum memadai.
11. Kurangnya sarpras untuk penunjang pelaksanaan kerja dan sarpras kearsipan.
12. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, terdiri atas:

1) Faktor Kekuatan Organisasi

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Jombang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Perangkat Daerah.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan ke-swadayaan masyarakat dan desa.
- d. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

2) Faktor Kelemahan Organisasi

- a. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di masing-masing desa.
- b. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
- c. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

b) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah:

1) Faktor Peluang Organisasi

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*).
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat dan desa, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat dan desa dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat dan desa.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

2) Faktor Tantangan Organisasi

- a. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta.
- b. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
- d. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, dan daya saingnya.
- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari DPMD, maka beberapa isu-isu penting mengenai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh DPMD, antara lain:

1. Pengelolaan BUMDes/BUMDes bersama.
2. Belum adanya kawasan khusus sebagai identitas daerah.
3. Keterlambatan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
4. Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan desa.
5. Kurang intensifnya pemantauan pelaksanaan pembangunan desa.
6. Kurang intensifnya pemantauan pelaksanaan pembangunan desa.
7. Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur desa.
8. Lemahnya tingkat pembangunan partisipatif desa.
9. Belum adanya legalitas keberadaan lembaga adat, sosial dan budaya dari pemerintah desa.
10. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
11. Belum optimalnya inventarisasi aset desa.
12. Kurang tertib pengelolaan keuangan desa.
13. Kurangnya inovasi dalam pengembangan potensi desa.
14. Tata kelola pemerintahan desa kurang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang belum maksimal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Jombang	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76.43%	57.040	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Jombang	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76.43%	57.040	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Jombang	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	302 desa	57.040	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Jombang	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	302 desa	57.040	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.175 unit	57.040	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1.175 unit	57.040	Lunching dan Sosialisasi BKK Sarpras Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Jombang	% desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	36.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Jombang	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	36.000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Jombang	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya	194 desa	36.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Jombang	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya	194 desa	36.000	
			jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya	8 desa				jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya	8 desa		
			jumlah desa yang kawasan perdesaannya dibina	2 desa				jumlah desa yang kawasan perdesaannya dibina	2 desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 dokumen	16.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 dokumen	16.000	Pembinaan BUMDesMa
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	10.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	10.000	Kerjasama desa dengan pihak ketiga (perusahaan)
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	10.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	10.000	Pembinaan Kawasan Perdesaan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Jombang	IKM Desa	84.1	2.701.443.800	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Jombang	IKM Desa	84.1	2.701.443.800	
			IPP Desa	2.94				IPP Desa	2.94		
			Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes	100%				Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes	100%		
			Prosentase Peningkatan status BUMDes/BUMDesma	20,50%				Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Prosentase LPPDesa berkategori baik	9,90%	2.701.443.800	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Prosentase LPPDesa berkategori baik	9,90%	2.701.443.800	
			Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDDes, APBDes yang tersusun	100%				Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDDes, APBDes yang tersusun	100%		
			Jumlah desa dengan BUMDes aktif	62 desa				Jumlah desa dengan BUMDes aktif	62 desa		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	21 dokumen	7.515	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	21 dokumen	7.515	Pembinaan dan monev produk hukum desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	242.349.100	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	242.349.100	Pembinaan Penyusunan RKPDDes,RPJMD es, Up date Sabdo Palon
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	42 dokumen	24.999.900	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	42 dokumen	24.999.900	Pembinaan Penyusunan APBDes dan LRA desa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Jombang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	162.548.800	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Jombang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	162.548.800	Pembinaan terhadap Kades
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 laporan	4.599.950	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 laporan	4.599.950	Pembinaan terhadap Sekdes,Kasi,Kas un
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 dokumen	11.922.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 dokumen	11.922.000	Penyusunan IPPDesa dan IKMDesa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	302 dokumen	30.000.100	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	302 dokumen	30.000.100	Penyelesaian Tukar menukar Tanah Kas Desa, Pembinaan Penyusunan laporan asset desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Jombang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	71.415.150	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Jombang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	71.415.150	Pembinaan terhadap Anggota BPD
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Jombang	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	100 desa	2.000.000.200	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Jombang	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	100 desa	2.000.000.200	Pemasangan patok batas desa
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	302 laporan	14.600.100	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	302 laporan	14.600.100	Pembinaan penyusunan LPPDes
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	2 dokumen	36.493.500	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	2 dokumen	36.493.500	Lomba desa dan update

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			perkembangan desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga kerjasama antar desa	100 dokumen	95.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	100 dokumen	95.000.000	Pembinaan dan monev BUMDes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Jombang	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	177.287.750	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Jombang	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	177.287.750	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	302 desa	177.287.750	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	302 desa	177.287.750	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Jombang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 lembaga	103.655.400	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Jombang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga	103.655.400	Pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	21.632.450	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	21.632.450	Pembinaan pemanfaatan tehnologi tepat guna di desa dan Gelar TTG Nasional
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	51.999.900	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	51.999.900	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten dan propinsi Jawa Timur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Jombang	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6.478.882.672	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Jombang	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6.478.882.672	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	47.644.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	47.644.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.150	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.150	Penyusunan dokumen perencanaan
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	32.494	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	32.494	Penyusunan dok saki
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5.314.132.812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5.314.132.812	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 orang	5.122.192.812	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 orang	5.122.192.812	Gaji dan TPP
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	191.940.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	191.940.000	Honor Pengelola Keuangan (PA,PPK,PPTK)
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	37.245.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	37.245.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	9.645.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	9.645.000	Up date data ASN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	18.000	Seragam dinas
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	422.205.100	Administrasi umum perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	422.205.100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	13 paket	14.993.200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 paket	14.993.200	Komponen listrik (lampu,skakel dll)
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	21 paket	57.624.500	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	21 paket	57.624.500	ATK
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	16 paket	44.894.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	16 paket	44.894.600	Pemadam,Loundr y,LPG,Umbul2
	Penyediaan Logistik Kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15.230 paket	144.050,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15.230 paket	144.050,000	Mamin Harian dan BBM

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	5 paket	7.174.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	7.174.800	Cetak Map Dinas, Amplop Dinas dan Foto Copy
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.528.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.528.000	Jawa Pos
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	149.940.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	149.940.000	Menghadiri Undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.600.000	Hidangan tamu
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	453.990.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	453.990.160	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	115.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	115.000	Rekening Listrik, Telpun, Air
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	52 laporan	201.590.160	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	52 laporan	201.590.160	Jasa Kebersihan dan Publikasi
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	137.400	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	137.400	Honorarium non PNS
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Jombang	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	203.665.600	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Jombang	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	203.665.600	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.610.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.610.000	Pemeliharaan kendaraan dinas es 2 dan pajak
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	119.050.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	119.050.000	Pemeliharaan kendaraan dinas (R-4 dan R-2) operasional dan pajak
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	80 unit	46.005.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 unit	46.005.600	Pemeliharaan AC,Komputer,Lap top,Printer

**menggunakan format tabel T-C.31.*

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat daerah berpedoman pada RENSTRA DPMD tahun 2024 - 2026 dan tahun berjalan dengan sistematika penyajian berdasarkan Surat Edaran KDH tentang Penyusunan Renja 2024. Setelah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah Renja 2024 dengan tujuan untuk memudahkan usulan-usulan program dan kegiatan maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Renja DPMD berdasarkan Berita Acara Forum PD.

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Jombang Tahun 2024 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Informasi dari propinsi, karena usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Jombang sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2019. Hasil rancangan akhir Renja PD kemudian disinkronisasi dengan RKPD melalui desk Bappeda dan disahkan oleh Bupati.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Jombang	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76.43%	57.040	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Jombang	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	302 desa	57.040	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1.175 unit	57.040	Louchning dan Sosialisasi BKK Sarpras Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Jombang	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	36.000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Jombang	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya	194 desa	36.000	
			jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya	8 desa		
			jumlah desa yang kawasan perdesaannya dibina	2 desa		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 dokumen	16.000	Pembinaan BUMDesMa
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	10.000	Kerjasama desa dengan pihak ketiga (perusahaan)
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	10.000	Pembinaan Kawasan Perdesaan
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Jombang	IKM Desa	84.1	2.701.443.800	
			IPP Desa	2.94		
			Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%		
			Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%		

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Prosentase LPPDesa berkategori baik	9,90%	2.701.443.800	
			Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDes, APBDes yang tersusun	100%		
			Jumlah desa dengan BUMDes aktif	62 desa		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Jombang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	21 dokumen	7.515	Pembinaan dan monev produk hukum desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	242.349.100	Pembinaan Penyusunan RKPDes,RPJM Des, Up date Sabdo Palon
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	42 dokumen	24.999.900	Pembinaan Penyusunan APBDDes dan LRA desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Jombang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	162.548.800	Pembinaan terhadap Kades
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 laporan	4.599.950	Pembinaan terhadap Sekdes,Kasi,Ka sun
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 dokumen	11.922.000	Penyusunan IPPDesa dan IKMDesa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	302 dokumen	30.000.100	Penyelesaian Tukar menukar Tanah Kas Desa, Pembinaan Penyusunan laporan asset desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Jombang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	302 orang	71.415.150	Pembinaan terhadap Anggota BPD
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Jombang	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	100 desa	2.000.000.200	Pemasangan patok batas desa
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	302 laporan	14.600.100	Pembinaan penyusunan LPPDes
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	36.493.500	Lomba desa dan update perkembangan desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	100 dokumen	95.000.000	Pembinaan dan monev BUMDes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Jombang	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	177.287.750	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	302 desa	177.287.750	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Kab.Jombang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	103.655.400	Pembinaan Lembaga

	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			kemasyarakat desa dan Lembaga adat desa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	21.632.450	Pembinaan pemanfaatan tehnologi tepat guna di desa dan Gelar TTG Nasional
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	51.999.900	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten dan propinsi Jawa Timur
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Jombang	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6.478.882.672	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	47.644.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15.150	Penyusunan dokumen perencanaan
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	32.494	Penyusunan dok saking
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	5.314.132.812	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 orang	5.122.192.812	Gaji dan TPP
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	191.940.000	Honor Pengelola Keuangan (PA,PPK,PPTK)
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	37.245.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	9.645.000	Up date data ASN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	18.000	Seragam dinas
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab.Jombang	Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	422.205.100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 paket	14.993.200	Komponen listrik (lampu,skakel dll)
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	21 paket	57.624.500	ATK
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	16 paket	44.894.600	Pemadam,Loun dry,LPG,Umbul2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15.230 paket	144.050,000	Mamin Harian dan BBM
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	7.174.800	Cetak Map Dinas, Amplop Dinas dan Foto Copy
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.528.000	Jawa Pos

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	149.940.000	Menghadiri Undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.600.000	Hidangan tamu
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Jombang	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	453.990.160	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	115.000	Rekening Listrik, Telpun, Air
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	52 laporan	201.590.160	Jasa Kebersihan dan Publikasi
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	137.400	Honorarium non PNS
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Jombang	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	203.665.600	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.610.000	Pemeliharaan kendaraan dinas es 2 dan pajak
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	119.050.000	Pemeliharaan kendaraan dinas (R-4 dan R-2) operasional dan pajak
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 unit	46.005.600	Pemeliharaan AC,Komputer,La ptop,Printer

*menggunakan format tabel T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berpedoman sebagaimana Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Jombang. Salah satu agenda pembangunan global dalam *Millienium Development Goals* (MDG's) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa. Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas.

Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah beserta desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespons isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Arah kebijakan Pembangunan yang dituang di Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Tujuan dalam upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa dengan indikator tujuan Jumlah Desa Mandiri.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah.

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi DPMD

- b. Meningkatnya Status Desa.

Indikator: Prosentase Desa yang meningkat statusnya

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merencanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan terdapat faktor faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program/kegiatan/sub kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 yaitu:

1. Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD
 - Program Penataan Desa dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah.
 - b) Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - c) Administrasi umum perangkat daerah.
 - d) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - e) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang							Lembar 1 dari 6		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	Kab. Jombang	76.43%	57.040	APBD		76.43%	57.040
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	Kab. Jombang	302 desa	57.040	APBD		302 desa	57.040
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Jombang	1.175 unit	57.040	APBD	Lounching dan Sosialisasi BKK Sarpras Desa	1.175 unit	57.040
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	Kab. Jombang	91,50%	36.000	APBD		91,50%	36.000
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya	Kab. Jombang	194 desa	36.000	APBD		194 ds	36.000
		jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya		8 desa		APBD		8 desa	
		jumlah desa yang kawasan perdesaannya dibina		2 desa		APBD		2 desa	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	5 dokumen	16.000	APBD	Pembinaan BUMDes Ma	5 dokumen	16.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	4 dokumen	10.000	APBD	Kerjasama desa dengan pihak ketiga (perusahaan)	4 dokumen	10.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Jombang	2 dokumen	10.000	APBD	Pembinaan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	10.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IKM Desa	Kab.Jombang	84.1	2.701.443.800	APBD		84.3	2.701.443.800
		IPP Desa		2.94		APBD		2.96	
		Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen		100%		APBD		100%	

		RPJMDes, RKPDes, dan APBDes							
		Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma		20,50%		APBD		20,50%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase LPPDesa berkategori baik	Kab.Jombang	9,90%	2.701.443.800	APBD		9,90%	2.701.443.800
		Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDes, APBDes yang tersusun		100%		APBD		100%	
		Jumlah desa dengan BUMDes aktif		62 desa		APBD		62 desa	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Kab.Jombang	21 dokumen	7.515	APBD	Pembinaan dan monev produk hukum desa	21 dokumen	7.515
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Jombang	1 dokumen	242.349.100	APBD	Pembinaan Penyusunan RKPDes, RPJMDes, Update Sabdo Palon	1 dokumen	242.349.100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Jombang	42 dokumen	24.999.900	APBD	Pembinaan Penyusunan APBDes dan LRA desa	42 dokumen	24.999.900
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab.Jombang	302 orang	162.548.800	APBD	Pembinaan terhadap Kades	302 orang	162.548.800
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Jombang	50 laporan	4.599.950	APBD	Pembinaan terhadap Sekdes, Kasasi, Kasu n	50 laporan	4.599.950
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Jombang	3 dokumen	11.922.000	APBD	Penyusunan IPPDesa dan IKMDesa	3 dokumen	11.922.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Jombang	302 dokumen	30.000.100	APBD	Penyelesaian Tukar menukar Tanah	302 dokumen	30.000.100

							Kas Desa, Pembina an Penyusu nan laporan asset desa		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab.Jombang	302 orang	71.415.150	APBD	Pembina an terhadap Anggota BPD	302 orang	71.415.150
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab.Jombang	100 desa	2.000.000.200	APBD	Pemas an patok batas desa	35 desa	2.000.000.200
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab.Jombang	302 laporan	14.600.100	APBD	Pembina an penyusu nan LPPDes	302 laporan	14.600.100
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab.Jombang	2 dokumen	36.493.500	APBD	Lomba desa dan update perkemb angan desa	2 dokumen	36.493.500
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab.Jombang	100 dokumen	95.000.000	APBD	Pembina an dan monev BUMDes	7 dokumen	95.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kab.Jombang	100%	177.287.750	APBD		100%	177.287.750
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kab.Jombang	302 desa	177.287.750	APBD		302 desa	177.287.750
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Jombang	7 lembaga	103.655.400	APBD	Pembina an Lembaga kemasyar akat desa dan Lembaga adat desa	7 lembaga	103.655.400

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab.Jombang	1 laporan	21.632.450	APBD	Pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna di desa dan Gelar TTG Nasional	1 laporan	21.632.450
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab.Jombang	1 laporan	51.999.900	APBD	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat Kabupaten dan propinsi Jawa Timur	1 laporan	51.999.900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	Kab.Jombang	100%	6.478.882.672	APBD		100%	6.478.882.672
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab.Jombang	100%	47.644.000	APBD		100%	47.644.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	3 dokumen	15.150	APBD	Penyusunan dokumen perencanaan	3 dokumen	15.150
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Jombang	12 dokumen	32.494	APBD	Penyusunan dok sakip	12 dokumen	32.494
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab.Jombang	100%	5.314.132.812	APBD		100%	5.314.132.812
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Jombang	33 orang	5.122.192.812	APBD	Gaji dan TPP	33 orang	5.122.192.812
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.Jombang	4 dokumen	191.940.000	APBD	Honor Pengelola Keuangan (PA,PPK, PPTK)	4 dokumen	191.940.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	Kab.Jombang	100%	37.245.000	APBD		100%	37.245.000

		kepegawaian perangkat daerah							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.Jombang	6 dokumen	9.645.000	APBD	Up date data ASN	6 dokumen	9.645.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Jombang	30 paket	18.000	APBD	Seragam dinas	30 paket	18.000
	Administarsi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan Administarsi perkantoran	Kab.Jombang	100%	422.205.100	APBD		100%	422.205.100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab.Jombang	13 paket	14.993.200	APBD	Kompone n listrik (lampu,sk akel dll)	13 paket	14.993.200
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Jombang	21 paket	57.624.500	APBD	ATK	21 paket	57.624.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab.Jombang	16 paket	44.894.600	APBD	Pemada m,Loundr y,LPG,U mbul2	16 paket	44.894.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Jombang	15.230 paket	144.050,000	APBD	Mamin Harian dan BBM	15.230 paket	144.050,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab.Jombang	5 paket	7.174.800	APBD	Cetak Map Dinas, Amplop Dinas dan Foto Copy	5 paket	7.174.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab.Jombang	2 dokumen	3.528.000	APBD	Jawa Pos	2 dokumen	3.528.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Jombang	42 laporan	149.940.000	APBD	Menghad iri Undanga n	42 laporan	149.940.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Jombang	4 Laporan	9.600.000	APBD	Hidangan tamu	4 Laporan	9.600.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Jombang	100%	453.990.160	APBD		100%	453.990.160
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Jombang	36 laporan	115.000	APBD	Rekening Listrik, Telpun, Air	36 laporan	115.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab.Jombang	52 laporan	201.590.160	APBD	Jasa Kebersih an dan Publikasi	52 laporan	201.590.160
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	24 laporan	137.400	APBD	Honorari um non PNS	24 laporan	137.400

	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab.Jombang	100%	203.665.600	APBD		100%	203.665.600
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Jombang	1 unit	38.610.000	APBD	Pemeliharaan kendaraan dinas es 2 dan pajak	1 unit	38.610.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Jombang	20 unit	119.050.000	APBD	Pemeliharaan kendaraan dinas (R-4 dan R-2) operasional dan pajak	20 unit	119.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Jombang	80 unit	46.005.600	APBD	Pemeliharaan AC,Komputer,Laptop,Printer	80 unit	46.005.600

*menggunakan format tabel T-C.33.

3.4 REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempertimbangkan aspek-aspek responsive gender terdapat 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan pagu anggarannya sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- Input : Rp.57.124.662
- Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi
- Outcome : Meningkatnya status desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Input : Rp. 15.999.776
- Output : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Outcome : Meningkatnya status desa
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Input : Rp. 10.000.050
- Output : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

- Outcome

:

Meningkatnya status desa
- 3)

Sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Input

:

Rp. 9.999.900

Output

:

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Outcome

:

Meningkatnya status desa
3.

Program Administrasi Pemerintahan Desa

a.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1)

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Input

:

Rp. 7.515.000

Output

:

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Outcome

:

Meningkatnya status desa

2)

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Input

:

Rp. 242.269.000

Output

:

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Outcome

:

Meningkatnya status desa

3)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Input

:

Rp. 24.999.700

Output

:

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Outcome

:

Meningkatnya status desa

4)

Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Input

:

Rp. 167.506.200

Output

:

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Outcome

:

Meningkatnya status desa

5)

Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Input

:

Rp. 94.997.462

Output

:

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Outcome

:

Meningkatnya status desa

6)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Input

:

Rp. 4.625.500

| Rencana Kerja DPMD Tahun 2024

Output : Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Outcome : Meningkatnya status desa

7) Sub kegiatan Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa

Input : Rp. 11.922.000
Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa
Outcome : Meningkatnya status desa

8) Sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

Input : Rp. 30.000.100
Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
Outcome : Meningkatnya status desa

9) Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Input : Rp. 71.379.000
Output : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Outcome : Meningkatnya status desa

10) Sub kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Input : Rp. 2.000.000.250
Output : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
Outcome : Meningkatnya status desa

11) Sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa

Input : Rp. 9.656.100
Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa
Outcome : Meningkatnya status desa

12) Sub kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Input : Rp. 36.493.200
Output : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Outcome : Meningkatnya status desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Input : Rp. 103.655.350
 - Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
 - Outcome : Meningkatnya status desa

- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Input : Rp. 21.657.000
 - Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Outcome : Meningkatnya status desa

- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Input : Rp. 51.975.400
 - Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Outcome : Meningkatnya status desa

- 4) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Input : Rp. 359.323.000
 - Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Outcome : Meningkatnya status desa

- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Input : Rp.15.210.000
 - Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Outcome : Nilai Reformasi Birokrasi

 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Input : Rp.32.492.000
 - Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Outcome : Nilai Reformasi Birokrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat dan dunia usaha yang berisi program/kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD tahun 2024 yang ditinjaulanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 dan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun TA 2024 agar benar benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua perangkat daerah supaya membuat rencana kerja tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun jarring aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* bila didukung oleh peran masyarakat luas untuk mengawasi pelaksanaannya sehingga terwujud pembangunan berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2024 guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Renja ini masih bersifat indikatif maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program - program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang namun juga oleh sumber pendanaan lainnya yaitu APBD Provinsi.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu, diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur DPMD Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi, karena secara substansi merupakan pencerminan implementasi program dan kegiatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Sangat diharapkan komitmen, kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur dalam mengaktualkan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja OPD ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Jombang, 14 Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN JOMBANG**

SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SSTP, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 200003 1 001